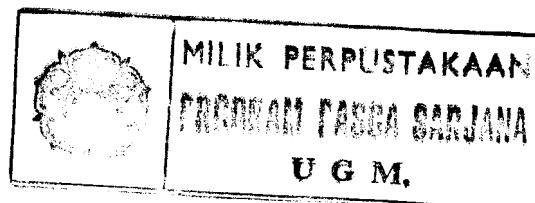




INTISARI

Tesis ini menggambarkan bagaimana dominannya peranan Pemerintah Orde Baru dalam melakukan pengendalian politik terhadap partisipasi politik, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan individu-individu. Pengendalian politik yang dilakukan pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional yang menjadi prasyarat utama dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Secara politis, Pemerintahan Orde Baru telah bertekad untuk melaksanakan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kenyataannya, pemerintah cenderung mengabaikan dan mengendalikan hak-hak politik rakyat yang sudah diatur dan dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Konsolidasi kekuasaan yang dilaksanakan Orde Baru bersama dengan militer dan birokrasi telah berhasil menampilkan pemerintahan yang kuat dan mampu mengendalikan politik kepartaian dengan melakukan penggarapan terhadap partai-partai politik yang dianggap kuat pada masa Orde Lama dan menampilkan Golkar sebagai partainya penguasa Orde Baru. Kemudian dilahirkan konsep monoloyalitas untuk mengendalikan pegawai negeri dari pengaruh partai politik. Pada tahun 1975 diterbitkan UU No. 3/75 yang berhasil menyederhanakan jumlah partai politik dari 9 menjadi 2 — partai PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) — dan melaksanakan kebijakan massa mengambang. Sepuluh tahun kemudian, pemerintah melakukan penyatuan asas bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya, PPP kehilangan identitas Islamnya dan PDI kehilangan identitas nasionalismenya. Pengendalian politik yang dilakukan pemerintah mengakibatkan pemerosotan terhadap partisipasi politik dan rakyat yang dapat mengganggu ketahanan nasional karena aspek politik di masyarakat telah berubah menjadi statis dan tidak lagi dinamis sebagaimana yang diharapkan.





ABSTRACT

This thesis describes how dominant the role of New Order Government in actualizing political control towards political participation, political party, social organization, and individuals. Political control held by government sustantively aims to provide national stability which becomes a main requisite to perform economic - oriented growth. Politically, New Order Government has embroidered to actualize democratization of Pancasila (five principles) and 1945 constitution purely and consequently. In fact, government tends to neglect and control people's political rights which have been regulated and ensured in the 28th article of the constitution.

Power consolidation held by New Order together with military and bureucracy has been successful to form strong government and able to carry out control of political party system by doing actualization towards political parties considered strong in Old Order era and present Golkar as a New Order ruler's party. Then, monoloyality concept was created to control public workers from political party influence. No. 3/75 law was published in 1975 to diffuse 9 into 2 political parties — PDI (Partai Demokrasi Indonesia/Indonesian Democracy Party) and PPP (Partai Persatuan Pembangunan/Development Unity Party) — and produce floating mass policy. Ten years later, government made a united principles to confess Pancasila (five principles) as the only ideology for social, national, and state lives. As result, identities of PPP's Islamization and PDI's nationalization were lost. Political control held by government causes a reduction of parties and people's political participation that is able to disturb national resilience because society's political aspect has changed to be static and not dynamic as expected.

